



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

Nomor : W15.PP.04.02-282 13 Februari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Raperkada Kabupaten Banyuwangi (Surat
Selesai Harmonisasi).

Yth. Bupati Banyuwangi
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Banyuwangi Nomor:

1. 100.3.6/02/429.011/2026 tanggal 02 Januari 2026;
2. 100.3.6/02/429.011/2026 tanggal 05 Januari 2026; dan
3. 100.3.6/49/429.011/2026 tanggal 23 Januari 2026,

Perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang:

1. Pembentukan Desa Persiapan Temumulyo Kecamatan Bangorejo;
2. Pembentukan Desa Persiapan Pesanggaran Wetan Kecamatan Pesanggaran;
3. Pembentukan Desa Persiapan Grajagan Pantai Kecamatan Purwoharjo;
4. Pembentukan Desa Persiapan Wonosobo Kulon Kecamatan Srono;
5. Pembentukan Desa Persiapan Kopenlaban Kecamatan Kabat;
6. Pembentukan Desa Persiapan Sumberrejo Kecamatan Siliragung;
7. Pembentukan Desa Persiapan Meneng Kecamatan Kalipuro;
8. Pembentukan Desa Persiapan Glondong Kecamatan Blimbingsari;
9. Batas Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro; dan
10. Batas Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari.

telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi sebagaimana dimaksud diatas, dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukanto

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum